

**POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA BEBAS AKTIF  
(STUDI PEMERINTAHAN ABDURRAHMAN WAHID)**



**SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**MIFTAHUL AZIZ  
03370320**

**PEMBIMBING**

- 1. Dr. AHMAD YANI ANSHORI**
- 2. Drs. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag**

**JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2009**

## ABSTRAK

Politik luar negeri suatu negara pada hakekatnya adalah hasil perpaduan dan refleksi dari politik dalam negeri yang dipengaruhi oleh perkembangan situasi nasional maupun Internasional. Berbagai perkembangan tersebut memberikan peluang sekaligus tantangan dalam formulasi kebijakan dan implementasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif.

Naiknya Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Presiden Republik Indonesia keempat yang terpilih secara demokratis ditengah persoalan bangsa yang sangat rumit mulai dari ancaman disintegrasi bangsa akibat dari konflik sosial yang bernuansa primordial dan melahirkan gerakan-gerakan separatis di beberapa wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang menjadikan citra buruk Indonesia di mata Internasional. Di lain pihak, proses peta geopolitik terus bergerak menuju tata dunia multipolar yang tentunya tidak hanya menjadi peluang baru tetapi juga ancaman baru bagi negara-negara berkembang. Situasi dan kondisi itulah yang menjadi pekerjaan rumah sekaligus tantangan bagi Gus Dur untuk menjalankan politik luar negeri bebas aktif .

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana politik luar negeri Indonesia bebas aktif di bawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka melalui pendekatan normatif dan sosio historis dengan metode *deskriptik-analitik* melalui teknik pengumpulan data diperoleh dari dan melalui sata primer dan data sekunder. Adapun analisis yang digunakan adalah menggunakan instrumen analisis deduktif dan interpretaktif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa politik laur negeri Indonesia bebas aktif pada masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid secara prinsip tidak mengalami perubahan dan masih menonjolkan peran presiden, yang berbeda adalah pada era Gus Dur, DPR diberi ruang untuk terlibat dalam politik luar negeri. Selain itu pada awal pemerintahannya, Abdurrahman Wahid memprioritaskan politik luar negeri pada upaya mendapatkan dukungan atas integrasi dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan upaya pemulihan ekonomi Indonesia.

Lebih dari itu, Abdurrahman Wahid dalam menjalankan politik luar negerinya tidak hanya mencoba keluar dari dikotomi Barat atau Timur tetapi mencoba menciptakan keseimbangan-keseimbangan baru dalam geopolitik. Di bawah kepemimpinan Abdurrahman Wahid, hubungan Indonesia dengan negara-negara Islam menagalami perkembangan yang lebih signifikan dan konkri, seperti hubungan tersebut sudah mulai dilembagakan.



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Surat Persetujuan Skripsi  
Lamp : I

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : MIFTAHUL AZIZ  
NIM : 03370320  
Judul : POLTIK LUAR NEGERI INDONESIA BEBAS AKTIF  
(STUDI PEMERINTAHAN ABDURRAHMAN WAHID)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 29 Robi'ul Akhir 1430 H  
24 April 2009 M

Pembimbing I

**Dr. Ahmad Yani Anshori**  
NIP. 150276308



### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi  
Lamp : II

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : MIFATAHUL AZIZ  
NIM : 03370320  
Judul : POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA BEBAS AKTIF  
(STUDI PEMERINTAHAN ABDURRAHMAN WAHID)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 29 Robi'ul Akhir 1430 H  
24 April 2009 M

Pembimbing II

**Drs. Ocktoberinsyah, M.Ag**  
NIP. 150289435



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/23/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : POLTIK LUAR NEGERI INDONESIA  
BEBAS AKTIF  
(STUDI PEMERINTAHAN  
ABDURRAHMAN WAHID)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : MIFTAHUL AZIZ

NIM : 03370320

Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 30 April 2009

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

**TIM MUNAQASYAH :**

**Ketua Sidang**

**Dr. Ahmad Yani Anshori**  
NIP. 150260055

**Penguji I**

**Drs. M. Rizal Qosim, M.Si**  
NIP. 15256649

**Penguji II**

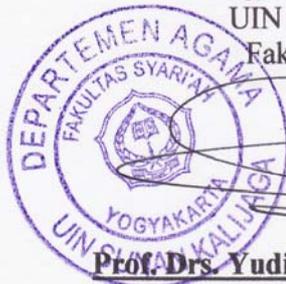
**Drs. Makhrus Munajat, M.Hum**  
NIP. 150260055

Yogyakarta, 1 Mei 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

**DEKAN**



**Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.**  
NIP. 150240524

## **MOTTO**



**”Tidak ada hal yang tidak mungkin, tapi tidak ada hal yang tidak sulit”**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**



**Teruntuk:**

**Kedua orang tuaku dan semua makhluk  
yang pernah memberiku manfaat**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله  
وأشهد أن محمدا رسول الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين  
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan berkah, rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang dengan kegigihan dan kebesarannya membimbing dan menuntun manusia kepada hidayah Allah.

Meskipun penyusunan skripsi ini baru merupakan tahap awal dari sebuah perjalanan panjang cita-cita akademis, namun penyusun berharap semoga karya ilmiah ini mempunyai nilai manfaat yang luas bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Islam.

Keseluruhan proses penyusunan skripsi ini telah melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini penyusun haturkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas segala bimbingan dan bantuan sehingga terselesaikan skripsi ini. Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
2. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah
3. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori selaku pembimbing I skripsi ini yang telah dengan sabar mengoreksi dan membimbing penyusun hingga skripsi ini selesai.
4. Bapak Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag selaku pembimbing II yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan penyusunan skripsi ini.

5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga yang ikhlas mentransfer segenap ilmunya untuk kami.
6. Kepada Ayahanda beserta Ibunda tercinta, terima kasih atas kucuran keringat, kramat do'a dan sepetiga malam Ayah dan Ibu yang tidak pernah lelah.
7. Sahabat-sahabat yang telah memberikan satu pesan bahwa andai selama ini tanpa kalian, hidup ini pasti pincang (keluarga besar PMII, Ashram Bangsa, Cendana dan keluarga Besar Caves, DEMMA 2005/2007)
8. Om Prabu Widad, Mas Kaisar, Mas Anwar, Mas Arif Nugroho S.HI dan Mas Raditnya Anjani.
9. Segenap Kolega yang jauh dan dekat atau tengah, tua atau muda.

Hanya kepada Allah SWT penyusun bersimpuh dan berdoa semoga iradahNya senantiasa membawa mereka atas kebahagiaan yang hakiki, amin.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, karena kami hanya seorang yang dhaif dan tak mungkin seperti ini bila tidak Engkau kehendaki.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta,  $\frac{26 \text{ Robi'ul Akhir } 1430 \text{ H}}{21 \text{ April } 2009 \text{ M}}$

Penyusun

**MIFTAHUL AZIZ**  
**03370320**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba`	b	be
ت	ta`	t	te
ث	sa`	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j{	je
ح	hā`	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha`	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra`	r	er
ز	za`	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	saæ	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	dhad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	th>	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	zh`	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa`	f	ef
ق	qaʕ	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	`el

م	mim	m	`em
ن	nun	n	`en
و	wawu	w	w
هـ	ha`	h	ha
ء	`	`	apostrof
ي	ya`	y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

طيبة	ditulis	ṭayyibatun
متعددة	ditulis	muta`addidatun

### C. Ta` Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis “h”

حكمة	ditulis	h}kmah
معاملة	ditulis	mu`amalah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”

مصلحة المرسلات	ditulis	mas}ahah al-mursalah
----------------	---------	----------------------

3. Bila ta` marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis dengan “t”

زكاة الفطر	ditulis	zakat al-fit}i
------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

	kasrah	ditulis	i
	fathah	ditulis	a
	dammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1. fathah + alif جاهلية	ditulis	a>
	ditulis	jaḥīyyah
2. fathah + ya` mati تنسى	ditulis	a>
	ditulis	tansa>
3. kasrah + ya` mati كريم	ditulis	i>
	ditulis	karim
4. dammah + wawu mati حقوق	ditulis	u>
	ditulis	ḥuquq

#### F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya` mati بينكم	ditulis	ai
	ditulis	bainakum
2. fathah + wawu mati قول	ditulis	au
	ditulis	qaul

#### G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a`antum
لئن شكرتم	ditulis	la`in syakartum

## H. Kata Sambung Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”(el)

القران	ditulis	al-Qur`an
القياس	ditulis	al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l”(el)nya

السماء	ditulis	as-sama>
الشمس	ditulis	asy-syamsu

## I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis Menurut Bunyi Pengucapannya dan Penulisannya

إذا علمت	ditulis	iza>alimat
اهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teori .....	10
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II. POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA SEBELUM</b>	
<b>ABDURRAHMAN WAHID</b>	
A. Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soekarno.....	19
1. Masa Revolusi: Periode Pencarian Bentuk .....	19
2. Demokrasi Parlementer: Tatanan Indonesia Baru .....	29

3. Demokrasi Terpimpin, Diplomasi Revolusioner: Membangun Dunia Kembali .....	35
B. Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif di Bawah Soeharto .....	39
1. Politik Luar Negeri Indonesia: Peran Kuat Mafia Berkaley dan Militer.....	40
2. Politik Luar Negeri: Kepemimpinan Politik Soeharto dan Berakhirnya Perang Dingin .....	44
C. Politik Luar Negeri di Bawah B.J Habibie .....	49

**BAB III. POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA BEBAS AKTIF DI  
BAWAH ABDURRAHMAN WAHID**

A. Profil Abdurrahman Wahid.....	53
B. Landasan Prinsip Bebas Aktif.....	61
C. Upaya Mendapatkan Dukungan atas Integrasi dan Kedaulatan serta Pemulihan Ekonomi Indonesia .....	66
D. Aliansi Negara-negara Islam: Menjadikan Islam Indonesia sebagai Pemimpin Dunia Islam.....	73
1. Perkembangan Pesat Hubungan Indonesia – Timur Tengah .....	75
2. Hubungan Indonesia – Brunei Darussalam.....	83
E. Membenahi Tata Dunia yang Timpang: Mewujudkan Kedaulatan dan Kemandirian NKRI .....	84
1. Transisi Hegemoni Dunia .....	84
2. Aliansi Strategis: Upaya Keluar dari Ketergantungan dan Menciptakan Tata Dunia Baru .....	90

F. Membuka Hubungan Dagang dengan Israel.....	93
---	----

**BAB IV. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	99
---------------------	----

B. Saran.....	100
---------------	-----

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>
-----------------------------	------------

**LAMPIRAN**

1. Curriculum Vitae.....	I
--------------------------	---

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Deklarasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan penegasan bahwa Indonesia juga termasuk bagian dari masyarakat Internasional yang berdaulat. Sebagai Negara yang berdaulat, Indonesia mempunyai kebijakan untuk mengatur hubungannya dengan dunia internasional. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari politik luar negeri yang dijalankan untuk kepentingan nasional.<sup>1</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 yang merupakan landasan konstitusional dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia, dalam pembukaanya mencantumkan:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban Dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>2</sup>

Kutipan di atas menjelaskan bahwa selain upaya untuk mencapai kepentingan nasional, politik luar negeri Indonesia pun juga bertujuan berkewajiban ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan atas kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial.

---

<sup>1</sup> Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan internasional Disiplin Metodologi* (Jakarta: PT Pustaka LP3S, 1994) cet II, hlm 141. pandangan ini merujuk pada pandangan yang awalnya disampaikan oleh Han J. Morgenthau dalam bukunya *Politik Among Nation: The Struggle For Power and Peace* (1980)

<sup>2</sup> Pembukaan UUD 1945

Politik luar negeri suatu Negara pada hakekatnya adalah hasil perpaduan dan refleksi dari politik dalam negeri yang dipengaruhi oleh perkembangan situasi regional maupun internasional. Patut dicermati, Indonesia yang lahir di tengah peta geopolitik pertarungan dua kekuatan antara blok barat yang dikomandoi oleh USA dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet (*Unipolar*) yang merupakan dampak dari perang dunia II, menjadi tantangan tersendiri bagi Soekarno sebagai proklamator sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia untuk mendapatkan pengakuan internasional atas kemerdekaan dan kedaulatan Negara Indonesia dan tetap dapat memainkan politik luar negeri yang bebas aktif.<sup>3</sup> Maka pada masa awal kemerdekaan yang lazim disebut masa Orde Lama (ORLA) di bawah kepemimpinan Soekarno politik luar negeri bebas aktif lebih diprioritaskan pada upaya pengakuan Dunia internasional terhadap kedaulatan Negara Indonesia dan punantasan dekolonialisasi.

Tahun 1966 adalah masa transisi Bangsa Indonesia, tepatnya setelah sidang MPRS tahun 1966 menunjuk Soeharto sebagai kepala pemerintahan sementara. Selain itu, sidang MPRS juga mengintruksikan kepadanya untuk membentuk pemerintahan baru dengan sasaran utama: stabilitas politik, rehabilitasi ekonomi dengan menjalankan pembangunan nasional dan mempertahankan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Situasi berlanjut

---

<sup>3</sup> Prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif ini pertama kali dikemukakan oleh Muhammad Hatta dalam keterangannya di depan Badan Pekerja K.N.I.P. pada 2 September 1948. Menurut Hatta, "Bebas" artinya "menentukan jalan sendiri, tidak terpengaruh oleh pihak manapun juga; aktif artinya menuju perdamaian dunia dan bersahabat dengan segala bangsa". Untuk lebih memahami mengenai konsep bebas aktif ini, lihat Mohammad Hatta, *Mendayung Antara Dua Karang*, Cet. II (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988). hlm. iii.

pada tahun era Orde Baru (Or Ba) yang ditandai dengan naiknya Soeharto menjadi presiden Republik Indonesia ke-II sejak tanggal 12 Maret 1967.

Berakhirnya perang dingin yang ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin pada tahun 1989 dan hancurnya Uni Soviet sebagai salah satu blok kekuatan dari tata Dunia Unipolar pada tahun 1991 memunculkan transisi hegemoni dalam kancah politik Dunia, namun dalam perjalannya sebenarnya tidak dengan sendirinya menjadikan Amerika Serikat dan sekutunya sebagai kekuatan hegemonik tunggal. Situasi yang terjadi justru munculnya kekuatan-kekuatan dan aliansi-aliansi baru yang mengarah pada apa yang disebut krisis hegemoni.<sup>4</sup> Secara kusus barakhirnya perang dingin telah mengakhiri persaingan yang bernuansa militer,<sup>5</sup> atau aliansi yang berpayung militer. Hal ini pula yang kemudian membuat hubungan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya sebagai salah satu blok kekuatan pada masa perang dingin yang berpayung militer menjadi tidak relevan lagi.

Di pihak lain, konsolidasi Uni Eropa yang berujung pada penerbitan mata uang bersama yang disebut *Euro* pada tahun 1999 serta munculnya aliansi strategis Shanghai Five 1996 dan menjadi *Shanghai Cooperation Organization* (SCO) 2001 di kawasan Asia dan munculnya klub pemimpin

---

<sup>4</sup> Hasyim Wahid, "Merangkai Indonesia Masa Depan", makalah disampaikan pada Kongres Mahasiswa Nusantara, diselenggarakan oleh DEMA UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 21 Februari 2006, hlm 9. ditegaskan lagi oleh A. Muhaimin Iskandar, *Spiritualitas Sepak Bola* (Jakarta&Yogyakarta: kerjasama DPP PKB&KLIK R, 2006) hlm 24.

<sup>5</sup> DR. Anak Agung Banyu Perwita dan DR. Yanyan Mochammad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (Bandung: PT Remaja rosdakarya, 2005) hlm 5.

anti Amerika Serikat di Amerika Latin menjadi indikasi bahwa tata Dunia bergerak ke arah *Multipolar*.<sup>6</sup>

Selain munculnya aliansi-aliansi baru dengan isu-isu baru pula, berakhirnya perang dingin juga menghadirkan aktor-aktor baru dalam hubungan internasional, sehingga Negara tidak lagi menjadi aktor tunggal dalam hubungan internasional. Hal inilah yang juga menjadi indikasi adanya krisis hegemoni, karena dengan hadirnya aktor non-Negara akan memunculkan kompetisi yang intensif antar perusahaan dan antar Negara. Munculnya aliansi-aliansi strategis dan kekuatan-kekuatan baru sebagai fakta perubahan tata dunia sebenarnya memberikan ruang yang sangat terbuka bagi Negara-negara Dunia ketiga termasuk Indonesia, untuk menata kembali politik luar negerinya yang bebas aktif secara mandiri.

Pada sisi lain, jika ditelaah lebih jauh Indonesia sebagai bagian dari gerak politik internasional pada rentan waktu yang bersamaan tepatnya 1998 terjadi reformasi politik di Indonesia yang ditandai dengan jatuhnya rezim Orde Baru. Presiden B.J. Habibie dengan kondisi Negara yang mengalami krisis multidimensi menjadi ancaman yang cukup serius terhadap legitimasi seorang Presiden, sehingga berusaha mendapatkan dukungan internasional dengan berbagai cara. Hal ini juga yang mungkin menjadi salah satu sebab Indonesia kehilangan satu wilayah kedaulatannya yaitu Propinsi Timor Timur akibat kegagalan kebijakan politik Luar Negerinya. Keputusan Habibie berdampak terhadap wilayah lain yang menginginkan kemerdekaan atau

---

<sup>6</sup> Hasyim Wahid, "Merangkai.", hlm 16.

melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan di mata internasional B.J. Habibie dinilai gagal karena terjadinya kekerasan pasca referendum.<sup>7</sup> Kondisi inilah yang kemudian menjadi ancaman serius disintegrasi Bangsa.

Naiknya Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Presiden Republik Indonesia yang keempat yang terpilih secara demokratis di tengah persoalan bangsa yang sangat rumit mulai dari ancaman disintegrasi Bangsa akibat dari konflik sosial yang bernuansa primordial dan melahirkan gerakan-gerakan separatis di beberapa wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang menjadikan citra buruk Indonesia di mata internasional. Di lain pihak, proses peta geopolitik terus bergerak menuju tata dunia Multipolar yang tentunya tidak hanya menjadi peluang baru tetapi juga ancaman baru bagi Negara-Negara berkembang. Situasi dan kondisi itulah yang menjadi pekerjaan rumah sekaligus tantangan bagi Gus Dur untuk menjalankan politik Luar Negeri bebas aktif .

Berangkat dari pemahaman Gus Dur yang relatif utuh atas struktur geopolitik, pada awal pemerintahannya Gus Dur memilih bahwa memulihkan citra Indonesia di mata internasional dan meredam gerakan-gerakan separatisme yang menjadi ancaman disintegrasi bangsa adalah hal yang harus diprioritaskan dalam kebijakan politik luar negerinya,<sup>8</sup> salah satunya dengan

---

<sup>7</sup> Ganewati Wuryandari, (ed) dkk, *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik*. (Jakarta dan Yogyakarta: kerjasama Pustaka Pelajar dan Pusat Penelitian Politik-LIPI, 2008) hlm. 187.

<sup>8</sup> Pernyataan pers akhir tahun 2000 Menteri Luar Negeri Indonesia, Dr. Alwi Shihab, Departemen Luar Negeri Indonesia, Jakarta 12 Januari 2001, hlm. 1.

melakukan perjalanan keliling ke-80 negara dalam tempo dua puluh bulan pemerintahannya.<sup>9</sup>

Selain itu, Gus Dur dalam menjalankan politik luar negerinya ada beberapa isu yang menarik diantaranya adalah; *Pertama*, rencana pembukaan hubungan dagang dengan Israel. *Kedua*, gagasan untuk membentuk poros Cina, Indonesia dan India dan aliansi-aliansi strategis.

Menurut Muhaimin Iskandar, Gus Dur adalah sosok santri yang menjelma menjadi cendekiawan rakyat dan pemimpin yang sangat berpengaruh, hal ini dikarenakan bukan karena semata-mata pada kepiawaian manuver politik yang diperagakan tetapi lebih pada kekuatan struktur pengetahuan yang dibangun untuk menjelaskan yang terjadi dan bagaimana proyeksi masa depannya.<sup>10</sup> Beberapa pemikirannya salah satunya bisa dilihat dari agenda Partai Kebangkitan Bangsa yang sering ditegaskan Abdurrahman Wahid selaku dewan Syuro dalam berbagai kesempatan diantaranya menjadikan Indonesia sebagai pemimpin Dunia Islam dan mengupayakan penyelesaian persoalan di Dunia ketiga dengan mekanisme dan oleh sesama Dunia ketiga sendiri.<sup>11</sup>

Atas dasar pemaparan di atas, penulis menganggap penelitian ini sangat penting dilakukan untuk mengurai dan menganalisa politik Luar Negeri

---

<sup>9</sup> Ganewati Wuryandari, (ed) dkk, *Politik Luar Negeri Indonesia.*, hlm. 189

<sup>10</sup> A. Muhaimin Iskandar, *Gus Dur, Islam dan Kebangkitan Bangsa* (Jakarta & Yogyakarta: kerjasama DPP PKB & KLIK R, 2007). hlm 24.

<sup>11</sup> A. Muhaimin Iskandar, *Melampaui Demokrasi, Merawat Bangsa dengan Visi Ulama: Refleksi Sewindu Partai Kebangkitan Bangsa* (Jakarta & Yogyakarta: kerjasama DPP PKB & KLIK R, 2006) hlm 17

bebas aktif Abdurrahman Wahid, yang diantaranya menjadi sebuah kontroversi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana politik luar negeri Indonesia bebas aktif di bawah kepemimpinan Abdurrahman Wahid?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian ini adalah:

- a) Mencari faktor yang melatarbelakangi politik luar negeri Indonesia bebas aktif Abdurrahman Wahid.
- b) Menggambarkan tipologi atau karakteristik politik luar negeri Indonesia bebas aktif Abdurrahman Wahid.

2. Kegunaan Penelitian ini adalah:

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti dan pembaca tentang politik luar negeri Indonesia bebas aktif periode Kepemimpinan Abdurrahman Wahid.
- b) Untuk mengetahui melatar belakang yang mempengaruhi Abdurrahman Wahid dalam politik luar negeri Indonesia bebas aktif.

- c) Penelitian ini diharapkan menjadi karya tulis ilmiah yang dapat menjelaskan implementasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif Abdurrahman Wahid.

#### **D. Telaah pustaka**

Hasil penulisan akademik tentang politik Luar Negeri Indonesia bebas aktif priode Kepemimpinan Abdurrahman Wahid sedikit jumlahnya. Maka disini penulis hanya menggunakan beberapa sumber yang sangat memiliki kedekatan dan signifikansi dalam penelitian skripsi ini sebagai kajian pustaka. Di samping itu, penulis juga mengungkap penelitian-penelitian terdahulu tentang politik Luar Negeri Indonesia bebas aktif Abdurrahman Wahid, serta hal-hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Di antara karya-karya yang berbicara tentang politik Luar Negeri Indonesia bebas aktif Abdurrahman Wahid adalah sebagai berikut.

Ganewati Wuryandari, (ed), dkk, *politik Luar Negeri Indonesia di tengah Pusaran Politik Domestic* (2008), dalam buku ini Ganewati Wuryandari, dkk melakukan kajian politik luar negeri Indonesia dalam rentan enam dekade sejak 1945 sampai 2007. Disini, Ganewati Wuryandari, dkk mengurai dan menganalisis faktor-faktor domestik yang mempengaruhi dinamika politik luar negeri Indonesia selama enam dekade terakhir (1945-2007), yaitu mulai dari Orde Lama hingga pasca Orde Baru. Buku ini juga mengevaluasi dan membandingkan kebijakan antar enam periode pemerintahan tersebut dalam hal perumusan dan pelaksanaan politik luar

negeri Indonesia. Buku yang ditulis secara gotong royong yang kesemuanya adalah peneliti pada Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI), lebih memfokuskan pada faktor domestik yang mempengaruhi politik luar negeri Indonesia dan di akhir kajian buku ini, mereka menjelaskan selama enam dekade ini meskipun terdapat perbedaan adaptasi dan gaya kepemimpinan pemimpin pada setiap periode setiap kepemimpinan nasional ternyata tidak ada perubahan prinsip bebas aktif dan politik luar negeri Indonesia. Oleh karena itu tidak berlebihan bila para penulis buku ini menyimpulkan bahwa politik bebas aktif masih dan akan terus menjadi prinsip yang dipegang setiap rezim.

Hasyim Wahid, dkk, *Telikungan Kapitalisme Global dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia* (1999), buku ini merupakan pembacaan ulang yang cerdas, tajam, padat dan provokatif terhadap sejarah kebangsaan Indonesia mulai dari proses berdirinya Indonesia hingga bercokolnya dinasti kapitalisme global. Menurut Wahid Hasyim, sejarah Indonesia merupakan perpanjangan tangan dari konstelasi global internasional. Analisis tentang Indonesia dan konstelasi global dalam buku ini secara sederhana dibagi dalam tiga fase, yaitu periode pra-kemerdekaan yang dibatasi pada semangat nasionalisme, masa kemerdekaan di bawah pengaruh perang dingin, dan masa orde baru yang berujung pada era reformasi.

A. Muhaimin Iskandar, *Gus Dur, Islam dan Kebangkitan Bangsa* (2008). Buku ini merupakan tulisan penulis yang pernah dipublikasikan di harian Jawa Pos, Seputar Indonesia dan Kompas selama setahun, ditambah

makalah penulis pada Musyawarah Kerja Keluarga Besar Marhaenis 2007. dalam buku ini, penulis menjelaskan bahwa pemikiran dan sikap politik Gus Dur pada hakikatnya merupakan terjemahan ajaran syariat dan pengembangan tradisi pesantren dari mana ia berasal. Dengan kata lain, politik (*siyasah*) Gus Dur bersumber pada ajaran Islam (*syariah*) dalam bingkai tradisi pesantren.

Sampai saat ini, karya tulis atau penelitian tentang politik Luar Negeri Gus Dur yang penulis temukan adalah skripsi Arie Rhistia Dewi Soemitro mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta yang berjudul *Politik Luar Negeri Indonesia di bawah pemerintahan Abdurrahman Wahid*. Skripsi ini hanya menitik beratkan pada pengaruh politik Luar Negeri Indonesia di bawah pemerintahan Abdurrahman Wahid terhadap kondisi politik serta lebih kusus dampak terhadap perekonomian Indonesia.<sup>12</sup>

Mengacu pada telaah pustaka di atas, jelas tampak kajian atau penelitian tentang politik Luar Negeri Indonesia bebas aktif priode kepemimpinan Abdurrahman Wahid belum banyak mendapatkan perhatian yang luas dikalangan akademisi dan kalaupun ada sifatnya masih parsial dan tematik. Sementara, dalam skripsi yang akan penulis susun, penulis akan lebih menitik beratkan pada pada tipologi dan gerakan politik Gus Dur dalam politik Luar Negeri Indonesia bebas aktif dan lebih jauh penulis berusaha membacanya dari kaca mata maqashid syari'ah.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Arie Rhistia Dewi Soemitro, "*Politik Luar Negeri Indonesia di bawah pemerintahan Abdurrahman Wahid*," skripsi sarjana UPN Veteran Yogyakarta, 2003.

<sup>13</sup> Teori ini dicetuskan oleh al-Juwaini yang kemudian dikembangkan oleh muridnya yang sangat jenius, Imam al-Ghazali. Lihat Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan amerika*. (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Prees, 2006) hlm. 44

## E. Kerangka Teoritik

Meski banyak definisi yang ditawarkan, Mohtar Mas' oed memberikan pengertian secara sederhana mengenai politik Luar Negeri. Menurut Mohtar Mas' oed,<sup>14</sup> politik Luar Negeri dapat diartikan sebagai suatu bentuk kebijaksanaan atau tindakan yang diambil dalam hubungan dengan situasi atau aktor yang ada di luar batas Negara. Lebih lanjut Mas' oed menjelaskan, kebijakan Luar Negeri yang dijalankan oleh pemerintah suatu Negara memang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional masyarakat yang diperintahnya meskipun kepentingan suatu bangsa pada waktu itu ditentukan oleh siapa yang berkuasa pada waktu itu.<sup>15</sup> Senada dengan Maso'ed, Thomas R.Dye dan Harmon Zeigler tentang "Teori Elit" yang menyatakan bahwa kebijakan yang dihasilkan merupakan preferensi dan nilai dari para elit yang berkuasa.<sup>16</sup>

Secara teori ada dua pandangan yang sangat kontradiktif mengenai apa yang sesungguhnya dimaksud dengan kepentingan nasional. Dalam orasi ilmiahnya ketika dikukuhkan sebagai Ahli Peneliti Utama LIPI, Dewi Fortuna Anwar secara jelas memberikan pandangannya mengenai konsep kepentingan nasional yang kontradiktif tersebut. Menurut Anwar, pandangan pertama lebih mengacu pada pendekatan "objektif". Pendekatan ini melihat "kepentingan nasional sesuatu yang bisa didefinisikan secara jelas dengan menggunakan

---

<sup>14</sup> Mohtar Mas' oed, *Studi Hubungan Internasional Tingkat Analisa dan Teorisisasi* . (Yogyakarta: PAU-Studi Sosial UGM, 1989) hlm. 187.

<sup>15</sup> Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan internasional Disiplin Metodologi*, cet II (Jakarta: PT Pustaka LP3S,1994) hlm 147.

<sup>16</sup> Ganewati Wuryandari, (ed) dkk, *Politik Luar Negeri.*, hlm 14-15.

kriteria yang objektif sehingga rumusan kepentingan nasional suatu Negara akan cenderung konstan dari waktu ke waktu”. Pada sisi lain, pandangan yang kedua lebih “subjektif” dalam melihat kepentingan nasional. Artinya, kepentingan nasional merupakan “sesuatu yang selalu berubah mengikuti preferensi subjektif para pembuat keputusan”.<sup>17</sup> Melalui pemahaman ini akan menghasilkan persepsi bahwa kepentingan nasional dapat saja mengalami perubahan. Artinya, bagaimana Negara merumuskan kepentingan nasionalnya dan aspek-aspek apa saja yang akan ditonjolkannya serta kebijakan yang dihasilkan, bisa saja sangat tergantung pada pandangan, sikap dan preferensi pilihan yang dibuat oleh para elit pembuat kebijakan.

William D. Coplin mengidentifikasi ada empat determinan politik luar negeri.<sup>18</sup> *Pertama*, adalah konteks internasional. Artinya, situasi politik internasional yang sedang terjadi pada waktu tertentu dapat mempengaruhi bagaimana negara itu akan berperilaku. *Kedua*, perilaku para pengambil keputusan dalam hal ini mencakup pihak eksekutif, kementerian dan lembaga Negara disuatu pemerintahan. *Ketiga*, adalah kondisi ekonomi dan militer. *Keempat*, adalah politik dalam negeri. Melalui perspektif ini yang ingin dilihat adalah sistem pemerintahan atau birokrasi yang dibangun dalam pemerintahan serta pengaruhnya dalam perpolitikan nasional.

Secara konseptual, pengertian Politik Luar Negeri RI dapat ditemui di dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

---

<sup>17</sup> Dewi Fortuna Anwar, “*menggagas politik luar Negeri Indonesia baru*,” [www.habibiecenter.or.id/download/polugri.pdf](http://www.habibiecenter.or.id/download/polugri.pdf), akses 14 Maret 2009.

<sup>18</sup> Ganewati Wuryandari, (ed) dkk, *Politik Luar Negeri* ., hlm, 17-18.

yang menjelaskan bahwa Politik Luar Negeri Republik Indonesia adalah: “Kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan Negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional.”<sup>19</sup>

Dalam rumusannya, kebijakan Luar Negeri Indonesia yang dianut adalah Politik Luar Negeri bebas aktif. Rumusan ini diambil ketika Wakil Presiden Mohammad Hatta untuk pertama kalinya mengemukakan prinsip Politik Luar Negeri bebas-aktif tersebut di depan badan pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP),<sup>20</sup> 2 September 1948. Dalam pidato bersejarah, “Mendayung di Antara Dua Karang”, menurut Hatta, “bebas” artinya “menentukan jalan sendiri, tidak terpengaruh oleh pihak manapun juga; aktif artinya menuju perdamaian dunia dan bersahabat dengan segala bangsa”.<sup>21</sup> Sedangkan menurut Soekarno bebas aktif berarti menciptakan keseimbangan.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Pasal 1 ayat 2, Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

<sup>20</sup> Beberapa pendapat mengatakan bahwa KNIP yang dibentuk selama periode revolusi berfungsi sebagai Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Penasehat Rakyat dan Dewan pertimbangan Agung. Lihat Leo Suryadinata, *Politik Luar Negeri di bawah Soeharto* (Jakarta: PT Pustaka LP3S, 1998) hlm. 30.

<sup>21</sup> Ganewati Wuryandari, (ed) dkk, *Politik Luar.*, hlm 6.

<sup>22</sup> Hal ini bisa dilihat sikap Soekarno dalam menghadapi pengaruh kepentingan Negara-negara besar di Indonesia, yang nampaknya sangat disadarinya. Contoh pengaruh paling nyata saat itu adalah adanya pertarungan kepentingan Negara-negara luar atas Indonesia dengan perdebatan yang cukup tajam antara bentuk Negara kesatuan dan federal. Untuk lebih jelasnya lihat Hasyim Wahid dkk, *Telikungan Kapitalisme Global*, hlm 22.

Menurut Hasyim Wahid,<sup>23</sup> sejarah Indonesia merupakan perpanjangan tangan dari pertarungan kepentingan sosial, politik, ekonomi dan wacana yang sedang bermain di dunia internasional.<sup>24</sup> Lebih lanjut Gus Iim menjelaskan bahwa bergeraknya tata Dunia ke arah multipolar sejalan dengan perubahan aliansi, daya saing dan kecerdikan para pemimpin Negara. Maka menjadi sangat penting para pemimpin mempunyai pemahaman yang relatif utuh atas struktur geopolitik untuk mampu membaca gerak geopolitik agar dapat tetap menjalankan politik Luar Negeri yang bebas aktif.<sup>25</sup>

Dengan demikian tidak berlebihan jika dikatakan politik Luar Negeri Indonesia bebas aktif adalah prinsip dan juga strategi negara Indonesia yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia serta upaya mempertahankan kesejahteraan dengan tetap berdaulat dalam Negara kesatuan republik Indonesia. Dalam perspektif ilmu politik Islam, upaya untuk mewujudkan kesejahteraan itu didasarkan pada satu kaidah fikih yang sangat populer, yaitu *tasyarruf al-imam 'ala ar-ra'iyah manun bil-maslahah* (kebijakan pemimpin atas rakyat harus diarahkan untuk kemaslahatan)<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Hasyim Wahid dilahirkan pada tanggal 30 September 1953. menurut M. Arif Hakim, Hasyim Wahid yang akrab dipanggil Gus Iim yang merupakan adik Abdurrahman Wahid ini adalah sosok yang aktif dalam lipatan-lipatan sejarah ditanah air, lihat Hasyim Wahid dkk, *Telikungan Kapitalisme Global dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia*. (Yogyakarta: LKiS, 1999) hlm vi.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm 1.

<sup>25</sup> Hasyim Wahid, "Merangkai.", hlm 1. Pandangan ini merujuk pada pandangan yang awalnya disampaikan oleh Ronaldo Munck, "Deconstructing Development Discourses: The Impasses, Alternatives and Politics", dalam Ronaldo Munck & Denis O'Hearn (eds.), *Critical Development Theory: Contribution to a New Paradigm* (London & New York: Zed Books, 1999).

<sup>26</sup> Eman Hermawan, dkk. *Partai Advokasi: Wacana Keberpihakan dan Gerakan*, cet.II (Jakarta & Yogyakarta: Sekretariat Jenderal DPP PKB & KLIK R), 2005 hlm. 12.

Dalam perspektif *Fikih as-Siyasah*, menurut Abdul Wahab Khallaf *Fikih as-Siyasah* ialah wewenang seorang penguasa atau pemimpin dalam mengatur kepentingan umum demi terciptanya kemaslahatan dan terhindar dari kemadlaratan.<sup>27</sup>

Dalam pandangan siyasah Dauliyah, hubungan internasional harus berlandaskan pada prinsi-prinsip, yaitu: prinsip kesatuan umat manusia, keadilan, persamaan, kehormatan manusia, toleransi, kerjasama kemanusiaan, kebebasan atau kemerdekaan dan prilaku moral yang baik, karena hukum asla di dalam hubungan internasional adalah damai.<sup>28</sup>

Lebih lanjut, Yudian Wahyudi, menghadirkan kembali maqoshid syari'ah tidak hanya sebagai doktrin tetapi juga sebagai metode. Sebagai doktrin, *maqoshid al-syari'ah* bermaksud mencapai, menjamin dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia. Untuk itu, dicanangkanlah tiga skala prioritas yang berbeda tetapi saling melengkapi: *al-dharuriyyat* (tujuan-tujuan primer), *al-Hajiyyat* (tujuan-tujuan sekunder) dan *al-Tahsinat* (tujuan-tujuan tertier).<sup>29</sup>

Sedangkan sebagai metode, maqoshid syari'ah disini dimaksudkan sebagai pisau analisa atau kaca mata untuk membaca kenyataan yang ada di sekitar kita.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Abdul Aziz Dahlan (ed), dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 1996) V: 1626, artikel "Siyasyah as-Syar'iyah".

<sup>28</sup> Prof. Drs. H.A Djazuli, *Fikih Siyasah implementasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Bandung, Adika Grafika: 2000) cet.I, hlm. 115-123.

<sup>29</sup> Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih versus Hermeneutika: Membaca.*, hlm 45-46.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm 48.

## F. Metode Penelitian

Dalam sub bab ini perlu disusun paparkan tentang metode penelitian yang digunakan. Antara lain meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, tehnik pengumpulan data, pendekatan-pendekatannya dan analisa data.

### 1. Jenis penelitian.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), dengan mengumpulkan data dan informasi tentang politik luar negeri bebas aktif priode pemerintahan Abdurrahman Wahid dari buku-buku perpustakaan, dokumentasi pemerintah dan karya-karya yang lain.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam menyusun skripsi ini bersifat *deskriptik-analitik*.<sup>31</sup> Penelitian yang bersifat deskriptif analisis bertujuan menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis, Metode deskriptif analisis itu dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya,<sup>32</sup> Adapun *analisis* disini adalah *analisis* dalam pengertian historis, yakni meneliti akar sejarah yang melatarbelakangi politik luar negeri Indonesia bebas aktif periode pemerintahan Abdurrahman Wahid.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Literatur-literatur yang dijadikan sebagai data dalam penulisan skripsi ini terbagi pada dua sumber; *sumber primer* dan *sumber sekunder*.

---

<sup>31</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan praktek*, cet.ke-II (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 245.

<sup>32</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990), hlm. 63.

Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi data primer adalah pernyataan pers akhir tahun 2000 menteri luar negeri Indonesia Sementara itu, buku-buku, jurnal, ensiklopedi, majalah, surat kabar yang berkaitan baik dengan politik luar negeri Indonesia bebas aktif periode pemerintahan Abdurrahman Wahid merupakan data sekunder.

#### 4. Pendekatan

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan sosio-historis. Maksud dari pendekatan normatif adalah dalam menganalisa data pendekatan dalil atau kaidah digunakan untuk melihat konsep implementasi dalam perspektif fikih siyasah termasuk dalam hal ini juga adalah beberapa produk perundangan yang berkaitan dengan politik luar negeri bebas aktif dan kebijakan publik Adapun pendekatan sosio-historis yaitu pendekatan yang menyatakan bahwa setiap produk pemikiran itu merupakan hasil interaksi pemikir dengan lingkungan sosio-kultural dan sosio-politik yang mengitarinya.<sup>33</sup> Berkaitan dengan penelitian ini sudah barang tentu sosial politik dan kultur yang melatarbelakangi kebijakan politik luar negeri Indonesia bebas aktif periode pemerintahan Abdurrahman Wahid akan dikaji sepanjang peristiwa tersebut.

---

<sup>33</sup> M. Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 105.

## 5. Analisa Data

Jika data telah terkumpul, dilakukan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis deduktif dan interpretatif.<sup>34</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan ini penyusun membagi menjadi lima bab:

Bab Pertama, adalah pembahasan dalam skripsi ini yang diawali dengan pendahuluan yang menguraikan seputar argumentasi tentang signifikansi dilakukannya penelitian ini. Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini diharapkan dapat menjadi kerangka berpijak untuk melangkah ke pembahasan bab-bab berikutnya.

Bab Kedua, pada bab ini akan dijelaskan politik luar negeri bebas aktif Indonesia di bawah Soekarno dan Soeharto

Bab Ketiga, selanjutnya pada bab ini penulis akan menjelaskan politik luar negeri bebas aktif Indonesia di bawah Abdurrahman Wahid.

Bab keempat, penutup berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan dimaksudkan untuk memperlihatkan letak signifikansi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

---

<sup>34</sup> Deduksi merupakan langkah analisis dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Sedangkan interpretatif artinya menafsirkan, membuat tafsiran, tetapi yang tidak bersifat subjektif (menurut selera orang yang menafsirkan) melainkan bertumpu pada *evidensi* objektif untuk mencapai kebenaran yang objektif. Lihat Sudarto, *Metode...*, hlm. 42-43.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Politik luar negeri Indonesia senantiasa berkembang disesuaikan dengan kepentingan nasional (*Nasional Interest*) dan perubahan sistem internasional. Tetapi secara prinsip, politik luar negeri pada masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid tidak mengalami perubahan yaitu tetap bebas dan aktif. Hampir sama dengan Soeharto, Soekarno bahkan Habibie, pada era kepemimpinan Gus Dur pelaksanaan politik luar negeri lebih menonjolkan peran presiden, yang berbeda adalah pada era Gus Dur dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 24 tahun 2000 dan perubahan yang terjadi pada pasal 13 UUD 1945, memberikan ruang bagi DPR untuk terlibat dalam politik luar negeri, khususnya menyangkut perjanjian dengan negara lain dan penunjukan duta besar.

Naiknya Gus Dur pada saat Indonesia dalam keadaan yang sangat buruk, baik di bidang ekonomi maupun politik, khususnya menguatnya ancaman disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, pada awal pemerintahannya, politik luar negeri diprioritaskan pada upaya mendapatkan dukungan terhadap proses pemulihan ekonomi Indonesia, lebih khusus lagi upaya mendapatkan dukungan atas integrasi dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selain itu, munculnya aliansi-aliansi baru dalam geopolitik dibaca dengan baik oleh Gus Dur, sehingga dalam menjalankan politik luar

negerinya, Gus Dur tidak hanya mencoba keluar dari dikotomi barat atau timur, lebih dari itu berbekal prinsip bebas aktif Gus Dur mencoba menciptakan keseimbangan-keseimbangan baru dalam geopolitik.

Di bawah kepemimpinan Gus Dur, hubungan Indonesia dengan negara-negara Islam, khususnya Timur Tengah dan Brunei Darussalam mengalami perkembangan yang lebih signifikan dan konkrit. Seperti sudah adanya lembaga-lembaga yang dibentuk sebagai sarana awal ke arah yang lebih baik. Penulis juga menyimpulkan kebijakan politik luar negeri Gus Dur adalah terjemahan dari politik Islam.

## **B. Saran-saran**

Sebagai hasil penelitian skripsi ini masih jauh dari kata memadai untuk mengurai politik luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Abdurrahman Wahid, terlebih mengenai gagasan Abdurrahman Wahid oleh karenanya penulis ajukan kepada peneliti yang lain untuk terus melakukan kajian dan telaah yang lebih mendalam, sistematis, kritis dan komprehensif.

Dan semoga menjadi manfaat bagi pembaca khalayak umum yang ingin tahu lebih jauh tentang politik luar negeri Indonesia yang "Bebas Aktif" supaya tidak terjebak pada pemahaman yang salah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh

Aziz Dahlan, Abdul (ed), dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996

Djazuli, H.A, *Fikh Siyasah: Implrmntasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, Bandung: Gunung Djati Pers, 2000.

Mudzhar, M. Atho', *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.

Wahyudi, Yudian, *Ushul Fikih versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Prees, 2006.

### B. Kelompok Lain-lain

Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.

Anwar, Dewi Fortuna, "Menggagas Politik Luar Negeri Indonesia Baru," [www.habibiecenter.or.id/donload/polugri.pdf](http://www.habibiecenter.or.id/donload/polugri.pdf), akses 14 maret.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan praktek*, cet.ke-II Jakarta:: Rineka Cipta, 1998.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990,

Banyu, Anak Agung dan Mochammad Yani, Perwita Yanyan *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: PT Remaja rosdakarya, 2005.

Dewi Soemitro, Arie Rhistia "Politik Luar Negeri Indonesia di bawah pemerintahan Abdurrahman Wahid," skripsi sarjana UPN Veteran Yogyakarta, 2003.

Eko, Sutoro, *Transisi Demokrasi Indonesia: Runtuhnya Rezim Orde Baru*, Yogyakarta: APMD Pers, 2003.

Danudjaja, Budiarto, *Hari-hari Indonesia Gus Dur*, Yogyakarta: Glang Pers, 2001.

Djamaluddin Malik, Dedy dan Idy Subandy Ibrahim, *Zaman Baru Islam Indonesia: Pemikiran dan Aksi Politik Abdurrahman Wahid*, M. Amien

Rais, Nurcholis Madjid, dan Jalaluddin Rakhmat, Bandung, Zaman Wacana Mulia, 1998.

David Ransom, *Mafia Berkeley dan Pembunuhan Masal di Indonesia*, Jakarta, Koalisi Anti Utang, 2006.

Djalal, Hasyim, *Politik Luar Negeri Indonesia dalam Dasawarsa 1990*, Jakarta: CSIS, 1997.

Fatah, Dr. Abdoel, *Demiliterisasi Tentara*, Yogyakarta, LKiS, 2005.

Greg Barton, *Biografi Gus Dur The Authorized Biography Of Abdurrahman Wahid*, Yogyakarta, PT. LKiS Pelangi Aksara, 2008.

Greg Barton dan Greg Fealy, *Tradisionalisme Radikal, Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*, Yogyakarta: LKiS, 1997.

Hakim, M. Arief, *Gus Dur dan Demokrasi*, dalam *Membangun Budaya Kerakyatan: Kepemimpinan Gus Dur Dan Gerakan Sosial NU*, Yogyakarta, Titian Ilahi Press.

Hermawan, Eman, *Politik Isu Tunggal Jalan Buntu Gerakan Masyarakat Sipil*, Jakarta & Yogyakarta: kerjasama DKN Garda Bangsa & KLIK R, 2002.

\_\_\_\_\_, dkk. *Partai Advokasi: Wacana Keberpihakan dan Gerakan*, Jakarta & Yogyakarta: Sekretariat Jenderal DPP PKB & KLIK R, 2005.

Hermawan, Eman dkk, *Pitutur dan Kekuatan Gaib*, Yogyakarta, Klik R.

Iskandar, A. Muhaimin, *Gus Dur, Islam dan Kebangkitan Bangsa* Jakarta & Yogyakarta: kerjasama DPP PKB & KLIK R, 2007.

\_\_\_\_\_, *Gus Dur Yang Saya Kenal: Sebuah Catatan tentang Transisi Demokrasi Kita*, Yogyakarta: LKiS, 2004.

\_\_\_\_\_, *Melampaui Demokrasi, Merawat Bangsa dengan Visi Ulama: Refleksi Sewindu Partai Kebangkitan Bangsa*, Jakarta & Yogyakarta: kerjasama DPP PKB & KLIK R, 2006.

\_\_\_\_\_, *Spiritualitas Sepak Bola*, Jakarta & Yogyakarta: kerjasama DPP PKB & KLIK R, 2006.

Kompas 31 Oktober 1999.

\_\_\_\_\_, 28 Januari 1999.

Levier, *Politik Luar Negeri Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia, 1989.

Masdar, Umaruddin, *Gus Dur Pecinta Ulama Sepanjang Zaman, Pembela Minoritas Etnis Keagamaan*, Jakarta & Yogyakarta: kerjasama DPP PKB & KLIK R, 2005.

\_\_\_\_\_, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais tentang Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Mas' oed, Mohtar, *Studi Hubungan Internasional Tingkat Analisa dan Teorisasi*, Yogyakarta: PAU-Studi Sosial UGM, 1989.

\_\_\_\_\_, *Ilmu Hubungan internasional Disiplin Metodologi*, Jakarta: PT Pustaka LP3S, 1994.

*Pidato Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 7 agustus 2000.*

Pernyataan pers akhir tahun 2000 Menteri Luar Negeri Indonesia, Dr. Alwi Shihab, Departemen Luar Negeri Indonesia, Jakarta 12 Januari 2001.

Republika, 15 November 1999.

Said Ali, As'ad, *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Bangsa*, Jakarta: LP3ES, 2009.

Salim Said, *Tumbuh dan Tumbangnya Dwi Fungsi: Perkembangan Pemikiran Politik Militer Indonesia 1958 – 2000*, Jakarta: Aksara Karunia, 2002.

Sihbudi, Riza, *Indonesia Timur Tengah: Masalah dan Prospek*, Jakarta: Gherna Insani, 1997

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Suryadinata, Leo, *Politik Luar Negeri di bawah Soeharto*, Jakarta: PT Pustaka LP3S, 1998.

Tempo, "Pelajaran dari Dunia Hiruk Pikuk", 17 Agustus 2007

Undang-Undang Dasar 1945.

\_\_\_\_\_, No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

\_\_\_\_\_, No. 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional.

- Uhlin, Anders, *Oposisi Bergerak: Arus Deras Gelombang Demokratisasi di Indonesia*, Bandung, Mizan, 1998.
- Wahid, Hasyim dkk, *Telikungan Kapitalisme Global dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Wahyudi, Yudian, *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik: Bersifat Hukum Islam dari Harvad ke Sunan Kalijaga*, Yogyakarta, Nawe Sea Press, 2007.
- \_\_\_\_\_, "Merangkai Indonesia Masa Depan", makalah disampaikan pada Kongres Mahasiswa Nusantara, diselenggarakan oleh DEMA UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 21 Februari 2006.
- Wibisono, Makarim, *Tantangan Diplomasi Multilateral*, Jakarta: LP3ES 2006.
- Wibowo dan Francis Wahono (ed), *Noe Liberalism*, Yogyakarta: Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas, 2003.
- Wuryandari, Ganewati (ed) dkk, *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik*. Jakarta dan Yogyakarta: kerjasama Pustaka Pelajar dan Pusat Penelitian Politik-LIPI, 2008.
- Yahya A. Muhaimin, *Masalah Kebijakan Pembinaan Pertahanan Indonesia*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.
- Zon, Fadli, *Gerakan Etnonasionalis: Bubarnya Imperium Uni Soviet*, Jakarta: Kerjasama Institut for Policy Studies (IPS) & Puataka Sinar Harapan, 2002.

## Lampiran I

### **Biografi K.H Abdurrahman Wahid**

Abdurrahman Wahid DI Jombang Jawa Timur pada tanggal 7 September 1940. Seorang ulama' terkemuka, intelektual yang liberal dan Presiden Republik Indonesia ke-IV. Cucu dari pendiri Nahdhatul Ulama' (NU) dan putera menteri agama di masa Presiden Soekarno. Beliau adalah pewaris tradisi Islam yang teguh namun bersifat terbuka. Beliau lebih akrab dengan sapaan Gus Dur, sejak kecil Gus Dur masuk dunia pesantren, kemudian di Al-Azhar University dan University of Baghdad. Pada tahun 1984, segera setelah terpilih menjadi ketua NU, Gus Dur memisahkan diri dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang memberikan bagi organisasi tersebut untuk mengejar tujuan-tujuan politiknya. Beliau menjadi terkenal sebagai pluralis kritis Orde Baru, menggaubungkan diri dari intelektual sekuler dalam forum demokrasi. Setelah kemunduran Soeharto Beliau turut membidani dan menjadi pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Beliau terpilih menjadi presiden pada Oktober 1999. Pada Juli 2001, Beliau diturunkan.

## **CURRICULUM VITAE**

Nama : Miftahul Aziz  
Tempat/Tgl Lahir : Blitar, 01 April 1984  
Alamat Asal : Wlingi Blitar  
Alamat Yogyakarta : Gang Sawit sapen Yogyakarta  
Nama Ayah : Nur Salam  
Nama Ibu : Nuryatul Hidayah

### **Pendidikan**

1. SD N 1 Kampung Baru
2. MTS Subulussalam Oku, Sumsel.
3. MA Bahrul 'Ulum Tambak Beras Jombang